

***EKSISTENSI LEKRA DALAM PUSARAN MANIFESTO KEBUDAYAAN DEMOKRASI
TERPIMPIN***

Cici Widariyanti

Jurusan Sejarah, Universitas Negeri Malang ciciwidarn@gmail.com

Abstrak: Demokrasi Terpimpin merupakan sistem demokrasi yang berlangsung setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Diterapkannya sistem ini menyebabkan kekuasaan Soekarno bersifat mutlak, karena segala keputusan berada di tangan presiden. Salah satu kekuatan politik besar yang ada pada Demokrasi Terpimpin adalah Partai Komunis Indonesia (PKI). Dominasi PKI dalam sistem perpolitikan Indonesia semakin tampak dengan berdirinya lembaga-lembaga di bawah kepemimpinan PKI. Salah satu lembaga yang memiliki kedekatan dengan PKI adalah Lekra yang dibentuk pada 17 Agustus 1950. Keberpihakan Lekra pada rakyat kecil menyebabkan organisasi ini tidak hanya mengatasi permasalahan budaya, tetapi juga mendapat dukungan dari rakyat. Perkembangan Lekra pada masa Demokrasi Terpimpin ditunjukkan dengan munculnya sastrawan-sastrawan ternama seperti Pramoedya Ananta Toer. Selain bergerak di bidang seni dan kebudayaan, Lekra yang berideologi realisme-sosialis ini juga kerap melancarkan kritik sebagai bentuk aspirasi rakyat. Dalam perkembangannya, kekuatan politik yang dimiliki Lekra menyebabkan pertentangan di sejumlah seniman. Hal tersebut akhirnya melahirkan manifesto kebudayaan pada 17 Agustus 1963.

Kata kunci: *lembaga, budaya, Lekra, Manikebu*

Abstract: Guided Democracy is a democratic system that took place after the Presidential Decree of July 5, 1959. The implementation of this system caused Sukarno's power to be absolute, because all decisions were in the hands of the president. One of the major political forces in Guided Democracy is the Partai Komunis Indonesia (PKI). The dominance of the PKI in Indonesia's political system was increasingly apparent by the establishment of institutions under the leadership of the PKI. One of the institutions that have a close relationship with the PKI is Lekra which was formed on August 17, 1950. Lekra's alignments with the common people caused the organization not only to overcome cultural problems, but also to get support from the people. The development of Lekra during the Guided Democracy was shown by the emergence of famous writers such as Pramoedya Ananta Toer. Aside from working in the arts and culture, Lekra who has the ideology of socialist realism also often launches criticism as a form of people's aspirations. In its development, the political power possessed by Lekra caused opposition in a number of artists. This finally gave birth to a cultural manifesto in 17 August 1963.

Keywords: *institutions, culture, Lekra, Manikebu*

Pendahuluan

Demokrasi Terpimpin merupakan sistem demokrasi yang berlangsung di Indonesia pada tahun 1959-1965. Konsep Demokrasi Terpimpin diperkenalkan pertama kali di sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956 oleh Presiden Soekarno. Namun diterapkannya Demokrasi Terpimpin secara resmi baru terjadi pada tanggal 5 Juli 1959 setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden (Poesponegoro dan Notosusanto, 2010:421). Diterapkannya sistem Demokrasi Terpimpin ini dilatarbelakangi oleh permasalahan-permasalahan yang terjadi ketika berlangsungnya masa Demokrasi Liberal. Permasalahan tersebut diantaranya adalah munculnya beberapa gerakan separatisme, terganggunya pertumbuhan ekonomi akibat pergantian kabinet, konflik antar partai politik, serta kegagalan anggota konstituante dalam menyusun Undang- Undang Dasar yang baru (Sholehuddin dan Kasdi, 2015: 69). Sejak diterapkannya sistem demokrasi tersebut pengaruh kekuasaan Soekarno semakin besar dan bersifat mutlak, hal tersebut disebabkan oleh konsep Demokrasi Terpimpin dimana jalannya pemerintahan berpusat pada keputusan kepala negara atau presiden.

Selain Presiden Soekarno, kekuatan politik pada masa Demokrasi Terpimpin juga dimiliki oleh TNI AD serta Partai Komunis Indonesia (PKI). PKI juga termasuk salah satu ke dalam empat besar kekuatan partai politik di antara NU, Masyumi dan PNI. Hal tersebut menyebabkan Soekarno memberi PKI tempat dalam sistem perpolitikan Indonesia melalui konsep NASAKOM (Nasionalis, Agamis dan Komunis (Indrajat, 2016: 59). Dukungan penuh yang ditunjukkan PKI kepada tindakan politik Soekarno menyebabkan hubungan keduanya semakin dekat. Hal tersebut akhirnya memudahkan PKI untuk mendapat dukungan dari masyarakat, tidak hanya dari pendukung partainya tetapi juga dari pendukung Soekarno. Keterlibatan PKI dalam sistem Demokrasi

Terpimpin juga ditunjukkan dalam berbagai bidang, salah satunya adalah di bidang budaya. Perkembangan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) yang diyakini sebagai underbow dari PKI menyebabkan organisasi ini tidak hanya sebagai lembaga kebudayaan, tetapi juga sebagai alat politik untuk menarik simpati dari rakyat kecil. Kekuatan politik Lekra akhirnya mendapat pertentangan dari beberapa seniman yang lain. Pertentangan tersebut kemudian melahirkan Manifesto Kebudayaan yang terjadi pada 17 Agustus 1963. Tulisan ini dibuat untuk mengaji sejarah dan perkembangan Lekra beserta lembaga

kebudayaan lainnya, juga mengenai konflik yang terjadi antara Lekra dan Manikebu pada masa Demokrasi Terpimpin.

Metode

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode historiografi melalui studi pustaka. Penulis mengembangkan artikel dengan memanfaatkan buku maupun jurnal sebagai sumber sejarah. Penulis mengumpulkan informasi terkait sejarah perkembangan Lekra dan lembaga kebudayaan lainnya, serta eksistensi Lekra ketika terjadi Manifesto Kebudayaan pada masa Demokrasi Terpimpin. Metode yang digunakan oleh penulis terdiri dari pemilihan topik, heuristik, kritik sumber, interpretasi dan penulisan (Kuntowijoyo, 2013: 69). Tahap pertama yaitu pemilihan topik, disini topik yang dipilih adalah eksistensi Lekra pada masa Demokrasi Terpimpin. Tahap kedua adalah heuristik atau pencarian sumber, yaitu memanfaatkan studi pustaka yang berasal dari buku maupun jurnal. Tahap ketiga yaitu kritik sumber, penulis melakukan tahap verifikasi untuk memilih sumber-sumber yang akan digunakan. Tahap keempat adalah interpretasi atau penafsiran, yaitu menganalisis dan menafsirkan informasi yang didapat dari sumber sejarah untuk dikembangkan menjadi sebuah tulisan. Tahap terakhir yaitu historiografi atau penulisan

karya sejarah, disini penulis mengembangkan hasil analisisnya untuk diolah menjadi artikel. Dalam penulisan artikel ini, pendekatan atau metodologi sejarah yang digunakan oleh penulis adalah ilmu bantu politik.

A. Terbentuknya Lembaga Kebudayaan

Pada masa Demokrasi Terpimpin terdapat beberapa lembaga kebudayaan yang anggotanya merupakan bagian dari partai politik. Beberapa lembaga kebudayaan tersebut diantaranya adalah Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) milik PKI, Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN) milik PNI, serta Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia (Lesbumi) milik Nahdlatul Ulama (Moeljanto dan Ismail, 1995: 9-10). Tujuan partai politik memiliki lembaga kebudayaan tersebut adalah untuk mendapat dukungan massa sehingga pandangan politiknya dapat berpengaruh dalam sistem pemerintah (Susanti dkk, 2019: 99).

Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) didirikan oleh oleh D.N.Aidit, Ashar, A.S. Dharta, serta Njoto pada tanggal 17 Agustus 1950, bertepatan dengan hari proklamasi kemerdekaan yang ke-5. D.N. Aidit dan Njoto sendiri merupakan para pimpinan Partai Komunis Indonesia (PKI). Oleh sebab itu terbentuknya organisasi Lekra ini diyakini sebagai salah satu dari underbow PKI. Sebagai lembaga kebudayaan, keempat pendiri Lekra memperbolehkan seluruh lapisan masyarakat untuk bergabung ke dalam organisasi, baik itu seniman dan sastrawan maupun buruh dan petani yang biasa melakukan kegiatan kebudayaan (Yudiono, 2010: 128). Keterbukaan keanggotaan Lekra didasari atas keyakinan organisasi tersebut bahwa seni dan kebudayaan merupakan bagian dari rakyat yang tidak dapat dipisahkan. Dibentuknya Lekra ini juga bertujuan untuk menjaga perjuangan revolusi, yaitu dengan

melibatkan para seniman dan politisi dalam menjaga hasil revolusi tersebut.

Lekra yang bergerak di bidang seni, kebudayaan dan ilmu terbentuk ketika seni belum bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Oleh sebab itu kebudayaan yang tergabung dalam Lekra pada awalnya berkaitan dengan sastra, seni lukis, film, tari dan drama. Lekra yang memiliki visi untuk meghadirkan seni dalam setiap lapisan masyarakat akhirnya menghasilkan suatu slogan pada Kongres I di Solo. Slogan tersebut adalah “seni untuk rakyat” dan “politik adalah panglima” yang berarti seni merupakan hak yang dapat dinikmati semua orang, serta seni merupakan bagian dari rakyat yang dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan aspirasi. Karya para seniman Lekra sendiri mengandung nilai- nilai realisme-sosialis.

Terbentuknya Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN) dilatarbelakangi oleh pidato “Manifesto Politik” Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus

1959. Dalam pidatonya, Soekarno menyinggung mengenai imperialisme budaya yang sejajar dengan imperialisme politik dan ekonomi (Chisaan, 2008: 52). Permasalahan budaya tersebut juga pernah disampaikan Soekarno dalam pidatonya yang berlangsung pada tanggal 17 Agustus 1957. Dalam pandangan Soekarno, modernisasi yang terjadi di Indonesia tidak hanya mengubah kehidupan masyarakat di bidang politik dan ekonomi tetapi juga dapat menggerus eksistensi budaya. Melihat permasalahan tersebut, PNI yang merupakan partai

pendukung Soekarno akhirnya membentuk organisasi yang bernama Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN) dengan ideologi marhaenis. LKN akhirnya resmi terbentuk bersamaan dengan diselenggarakannya Kongres I di Surakarta pada tanggal 20 Mei 1959, dan diketuai oleh kader PNI yang bernama Sitor Situmorang.

Sedangkan terbentuknya Lembaga Seniman

Budayawan Muslimin Indonesia (Lesbumi) dilatarbelakangi oleh modernisasi yang terjadi dalam tubuh Nahdlatul Ulama. Modernisasi tersebut ditunjukkan Nahdlatul Ulama dengan dibentuknya lembaga-lembaga di bidang pendidikan, sosial ekonomi, buruh, perempuan dan budaya. Lesbumi yang terbentuk pada tahun 1962 tersebut terdiri dari para pekerja seni seperti bintang film, pelukis, sastrawan, serta beberapa ulama yang memiliki latar belakang di bidang seni (Chisaan, 2008: 155). Pembentukan lembaga kebudayaan ini pada awalnya juga mendapat pertentangan dari anggota Nahdlatul Ulama sendiri, hal tersebut disebabkan oleh keanggotaan Lesbumi yang tidak seluruhnya memiliki latar belakang NU (Noer, 2000: 86). Dilihat dari tahun terbentuknya Lesbumi, dapat dikatakan bahwa lahirnya organisasi ini dipengaruhi oleh faktor politik dan juga budaya. Faktor politik merupakan faktor ekstern yang meliputi manifesto politik Soekarno, konsep NASAKOM pada sistem Demokrasi Terpimpin, serta perkembangan Lekra (Sjamsu, 1971: 90-91). Sedangkan faktor budaya merupakan faktor intern yaitu kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di kalangan NU.

B. Perkembangan Lekra Pada Masa Demokrasi Terpimpin

Perkembangan Lekra pada masa Demokrasi Terpimpin paling tampak terjadi di bidang kesusastraan. Hal tersebut ditunjukkan dengan munculnya sastrawan-sastrawan ternama seperti Pramoedya Ananta Toer, Rivai Apin, Agam Wispi, Sobron Aidit dan Amaran Ismail Hamid (Rosidi, 2013: 192-193). Kemajuan di bidang sastra tersebut tidak terlepas dari berkembangnya sastra kerakyatan yang merupakan interpretasi dari slogan “politik adalah panglima” serta ideologi realisme-sosialis yang digunakan Lekra. Sastra kerakyatan sendiri merupakan hasil karya sastra yang berisi muatan politis mengenai aspirasi dan kepentingan rakyat. Rakyat yang

dimaksud dalam karya sastra Lekra merupakan masyarakat tertindas seperti kaum buruh dan petani. Meskipun bertujuan untuk

menyampaikan aspirasi rakyat, karya sastra yang dihasilkan Lekra menggunakan strategi konflik dengan menempatkan orang-orang yang tidak sepaham dengan Lekra sebagai lawannya (Yudiono, 2009: 104). Untuk menjalankan strategi tersebut, Lekra melakukan kritik besar-besaran terhadap lawannya melalui tulisan di surat kabar atau majalah. Salah satu media massa yang memberi ruang kepada Lekra untuk menyiarkan karya sastra maupun kritiknya adalah “*Harian Rakjat*” dengan Njoto sebagai kepala redaksinya (Yuliantri, 2010: 4). Publikasi karya sastra Lekra dalam media massa tersebut menjadi salah satu pemicu terjadinya perdebatan politik kebudayaan.

Dalam menciptakan karya sastra, seniman Lekra pada umumnya menggunakan kombinasi kerja 1-5-1, di tengah konsep “rakyat sebagai satu-satunya pencipta kebudayaan” serta “politik adalah panglima”. Kombinasi kerja yang pertama adalah meluas dan meninggi, yaitu seni atau kebudayaan harus dapat diterima oleh masyarakat tetapi tetap memiliki tujuan untuk mendidik masyarakat. Kombinasi kerja yang kedua adalah tinggi mutu ideologi dan artistik, yaitu ideologi berkepihakan kepada masyarakat kecil tetapi tetap memiliki nilai keindahan. Kombinasi kerja yang ketiga adalah tradisi kekinian yang revolusioner, yaitu karya seni yang diambil dari kebudayaan masa lalu yang dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Kombinasi kerja yang keempat adalah kreativitas individual dan kearifan massa, yaitu kreativitas individu yang dihubungkan dengan kondisi sosial dan politik. Dengan begitu maka seniman Lekra dituntut untuk berkesenian dengan tetap memperhatikan orang lain. Kombinasi kerja yang terakhir adalah realisme sosial yang turun ke bawah, yaitu sebuah karya seni yang dihasilkan dengan menjadi bagian dari masyarakat.

C. Konflik Lekra Dan Manikebu

Dalam perkembangannya, Lekra yang gencar melakukan tindakan agresif melalui karya sastra di media massa akhirnya mendapat balasan dari sejumlah seniman dan sastrawan yang tergabung dalam majalah "Sastra" (Yudiono, 2009:

106). Majalah yang mulai terbit pada Mei 1961 tersebut dipimpin oleh H.B. Jassin selaku kepala redaksi. Beberapa sastrawan yang tergabung dalam majalah ini diantaranya adalah Arief Budiman, Goenawan Mohamad, Sapardi Djoko

Darmono, serta Wiratmo Soekito. Gabungan beberapa sastrawan ini menyetujui bahwasannya seni bersifat humanis universal. Puncak perlawanan para sastrawan ini adalah dengan memproklamasikan

Manifesto Kebudayaan (Manikebu) pada tanggal 17 Agustus 1963 (Ricklefs,

2001: 542). Sastrawan yang menyatakan mendukung Pancasila ini menolak konsep NASAKOM yang dicetuskan oleh Soekarno, serta menolak adanya ideologi politik tertentu di dalam kebudayaan nasional. Bunyi dari manifesto kebudayaan tersebut adalah sebagai berikut (Jassin dalam Susanti dkk, 2019: 107):

Manifes Kebudajaan: (1) Kami para seniman dan tjendekiawan Indonesia dengan ini mengumumkan sebuah Manifes Kebudajaan, jang menjatakan pendirian, tjita-tjita, dan politik Kebudajaan Nasional kami. (2) Bagi kami kebudajaan adalah perdjoeangan untuk menjempurnakan kondisi hidup manusia. Kami mengutamakan salah satu sektor kebudajaan jang lain. Setiap sektor berdjoeang bersama-sama untuk kebudajaan itu sesuai kordratnja. (3) Dalam melaksanakan kebudajaan Nasional kami berusaha mentjipta

dengan kesungguhan jang sedjudjudjudjurnya sebagai perdjoeangan untuk mempertahankan dan mengembangkan martabat diri kami sebagai bangsa Indonesia di tengah-tengah masjarakat bangsa-bangsa. (4) Pantjasila adalah falsafah kebudajaan kami. Djakarta, 17 Agustus 1963.

Manifesto kebudayaan tersebut menimbulkan pro dan kontra di sejumlah kalangan masyarakat. Salah satunya adalah Lekra yang memberi respon kontra setelah empat bulan manifesto dikeluarkan (Jones, 2015: 125). Untuk menanggapi manifesto tersebut, Lekra melakukan serangan agresif kepada anggota manifesto kebudayaan baik dalam publikasi maupun pidato. Soekarno yang pada saat itu memiliki kedekatan dengan Lekra akhirnya melarang Manikebu pada 8 Mei 1964. Tidak berhenti sampai disitu, sastrawan yang tergabung dalam manifesto kebudayaan juga dikatakan sebagai kelompok penghambat revolusi, serta dianggap ingin menandingi manifesto politik milik pemerintah Demokrasi Terpimpin. Salah satu anggota penandatanganan manifesto kebudayaan yang menjadi korban dari pelarangan tersebut adalah H.B Jassin yang harus dicopot jabatannya sebagai dosen Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Setelah keputusan Presiden Soekarno melarang manifesto kebudayaan, para anggota manifesto mengirimkan surat sebagai permintaan maaf kepada

presiden. Surat permintaan maaf tersebut juga bertujuan untuk meredam serangan yang tertuju pada anggota manifesto (Suparsono, 2000: 82). Kegagalan manifesto kebudayaan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah ketidaktegasan sikap anggota dan dituangkan di dalam manifesto yang bersifat seruan umum. Faktor yang kedua adalah sikap independen anggota manifesto yang menyebabkan tertutupnya hubungan dengan sejumlah media massa. Faktor yang terakhir adalah unsur

politis yang lebih dominan daripada unsur kebudayaan dalam manifesto tersebut.

Secara garis besar sejumlah kelompok yang menyatakan persetujuannya terhadap manifesto kebudayaan disebabkan oleh kejenuhan terhadap Lekra yang mendominasi kebudayaan nasional dengan wacana seni kerakyatan. Selain itu kelompok yang setuju dengan manifesto ini pada umumnya mencari ekspresi seni yang tidak terikat dengan ideologi manapun. Sedangkan kelompok yang tidak setuju dengan hasil manifesto kebudayaan disebabkan oleh unsur politis yang Nampak pada manifesto tersebut.

Setelah kegagalan manifesto kebudayaan, Lekra menyelenggarakan Konferensi Sastra dan Seni Revolusioner (KSSR) pada tanggal 27 Agustus hingga 2 September 1964 di Jakarta (Yudiono, 2009: 104). Konferensi tersebut diselenggarakan dengan tujuan untuk menegaskan orientasi politik kebudayaan Lekra. Politik kebudayaan Lekra sendiri berkaitan dengan pembangunan nasional yang revolusioner, yaitu dengan melakukan pengabdian masyarakat kepada petani, buruh dan prajurit. Diselenggarakannya konferensi tersebut juga menunjukkan masih bertahannya eksistensi Lekra di tengah dilakukannya manifesto kebudayaan. Akan tetapi, eksistensi Lekra ini hanya dapat bertahan ketika masa Demokrasi Terpimpin. Seperti diketahui bahwa Peristiwa 30

September 1965 menyebabkan terjadinya pembubaran organisasi PKI, termasuk organisasi-organisasi yang berafiliasi dengan PKI. Oleh sebab itu Lekra resmi dibubarkan pada tahun 1965 dan para anggotanya banyak yang diasingkan dan tidak diadili, salah satunya adalah sastrawan Pramoedya Ananta Toer.

SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan maka dapat disimpulkan bahwasannya Demokrasi Terpimpin yang berlangsung sejak tahun 1959 memberi dampak di berbagai

bidang kehidupan, salah satunya adalah di bidang budaya. Dampak kemajuan di bidang budaya ditunjukkan dengan perkembangan sastra yang berasal dari Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra). Lekra yang didirikan oleh beberapa petinggi PKI menghasilkan karya sastra yang berideologi realisme-sosialis. Oleh sebab itu hasil karya sastra Lekra sarat muatan politisnya, karena bertujuan untuk menyampaikan aspirasi rakyat khususnya bagi kaum tertindas. Adanya kedekatan antara Lekra dan PKI tersebut menyebabkan organisasi ini diyakini sebagai underbow dari PKI. Tidak hanya Lekra, dalam perkembangannya muncul sejumlah lembaga kebudayaan yang berafiliasi dengan partai politik. Munculnya sejumlah lembaga kebudayaan tersebut juga disebabkan oleh pidato Presiden Soekarno terkait permasalahan budaya di dalam manifesto politik.

Kemajuan karya sastra yang dialami oleh Lekra tidak terlepas dari sikap agresif Lekra terhadap beberapa seniman atau sastrawan yang tidak sependapat dengan mereka. Serangan-serangan yang dilakukan oleh Lekra tersebut disalurkan melalui Harian Rakjat, dimana pimpinan redaksinya merupakan petinggi PKI. Tulisan-tulisan seniman Lekra yang dimuat oleh media cetak tersebut menjadi salah satu pemicu terjadinya konflik kebudayaan antara Lekra dan seniman yang lain.

Para seniman dan sastrawan yang menentang sikap politik kebudayaan Lekra akhirnya melakukan manifesto kebudayaan pada tanggal 17 Agustus 1963. Manifesto tersebut menghasilkan suatu konsepsi bahwasannya seni tidak boleh terikat dengan ideology politik manapun. Posisi Lekra yang pada saat itu merupakan organisasi besar, serta kedekatannya dengan Presiden Soekarno akhirnya menyebabkan manifesto kebudayaan dilarang mulai 8 Mei 1964. Kegagalan manifesto kebudayaan tersebut akhirnya menunjukkan eksistensi Lekra di kancah politik kebudayaan, setidaknya ketika masa Demokrasi Terpimpin. Hal tersebut

disebabkan oleh peristiwa 30 September yang turut menyebabkan dibubarkannya Lekra.

DAFTAR PUSTAKA

- Chisaan, C. 2008. *Lesbumi Strategi Politik Kebudayaan*. Yogyakarta: LKis. Indrajat, H. 2016. *Demokrasi Terpimpin Sebuah Konsepsi Pemikiran Soekarno Tentang Demokrasi*. *Jurnal Sosiologi*, (Online), 18(1): 53-62, (<http://jurnal.fisip.unila.ac.id/index.php/sosiologi/article/view/517>), diakses 12 Februari 2020.
- Jones, T. 2015. *Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia: Kebijakan Budaya Selama Abad ke-20 Hingga Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Moeljanto, D.S.& Ismail, T. 1995. *Prahara Budaya: Kilas-Balik Ofensif Lekra/PKI Dkk*. Bandung: Mizan.
- Noer, D. 2000. *Partai Islam di Pentas Nasional: Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia 1945-1965*. Bandung: Mizan.
- Poesponegoro, M.D. & Notosusanto, N. 2010. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ricklefs, M.C. 2001. *Sejarah Indonesia Modern*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta. Rosidi, A. 2013. *Ikhtisar Sejarah Sastra Indonesia*. Bandung: Pustaka Jaya.
- Sholehuddin, A. & Kasdi, A. 2015. *Jargon Politik Masa Demokrasi Terpimpin Tahun 1959-1965*. *Avatara: Jurnal Pendidikan Sejarah*, (Online), 3(1):69-81, (<http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/10726>), diakses 1 Februari 2020.
- Sjamsu, N. 1971. *Heboh Sastra 1968 Menuju Titik Kebenaran*. Sumatera: Pustaka Sa'adiah.
- Supartono, A. 2000. *Lekra vs Manikebu: Perdebatan Kebudayaan Indonesia 1950-1965*. Skripsi tidak diterbitkan. Jakarta: STF Driyakarya.
- Susanti, N., dkk. 2019. *Lekra vs Manikebu: Perlawanan Majalah Sastra terhadap Politik Kebudayaan Pemerintah Masa Demokrasi Terpimpin (1961-1964)*. *Jurnal Factum*, (Online), 8(1): 97-112, (<https://ejournal.upi.edu/index.php/factum/article/view/20121/0>), diakses 11 Februari 2020.
- Yudiono, K.S. 2010. *Pengantar Sejarah Sastra Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Yudiono, K.S. 2009. *Pengkajian Kritik Sastra Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Yuliantri, R.D.A. 2010. *Logika Hati dalam Sastra "Kiri" Indonesia (1950-1965)*. (Online), (http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pelitian/Rhoma%20Dwi%20Aria%20Yuliantri,%20S.Pd.,%20M.Pd./Paper_%20International%20Conference%20on%20Literature%20UNY_%20Logika%20Hati%20dalam%20Sastra_Rhoma%20FIS%20UNY.pdf), diakses 12 Februari 2020.